

PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PRAVITASARI EKA NINGTYAS

pravitasarieka@gmail.com

Dini Widyawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The reformation has been carried out by the government by issuing Regulations No. 17 of 2003 about the state financial which requires the content and the form of accountability of the implementation of State Budget/Local Government Budget which is prepared and presented in accord with Governmental Accounting Standard (SAP). The Governmental Accounting Standard is the requirement which has the legal force in order to improve the quality of financial statement. The purpose of this research is to test the influence of the effectiveness of the implementation of Governmental Accounting Standard to the quality of local government financial statement in the district of Sidoarjo. Quantitative approach is used in this research. The simple linear regression test with its significance level 5% which has been done by using SPSS 20 version is used as the data analysis method in this research. Based on the result of the hypothesis test it describes significance value $0.024 < 0.05$ and the result of regression test describes coefficient value 0.622. Therefore, it can be concluded that the effectiveness of the implementation of Government Accounting Standard has significant and positive influence to the quality of local government financial statement.

Keywords: Effectiveness, Governmental Accounting Standard, the Quality of Financial Statement

ABSTRAK

Pemerintah telah melakukan reformasi dalam mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear sederhana pada taraf signifikansi 5% dengan bantuan program SPSS versi 20. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,024 < 0,05$ dan hasil uji regresi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,622, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Efektivitas, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas yang terdiri dari ribuan pulau dengan budaya, sosial dan kondisi perekonomian yang berbeda antar masing-masing daerah sehingga membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Selain itu, di era globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing pada setiap pemerintah daerahnya. Daya saing pada pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat tercapai melalui otonomi daerah dengan peningkatan kemandirian pemerintah daerah

yang dapat diraih. Sehingga, dengan adanya otonomi daerah pengelolaan keuangan berada pada pemerintah daerah. Menghadapi kondisi yang demikian pemerintah melakukan reformasi dalam pengelolaan keuangan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Apabila pengelolaan keuangan daerah tersebut berhasil maka hal itu Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan pedoman atau acuan bagi pemerintah untuk penyusunan laporan keuangan.

Pada tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah selesai disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut, laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dan paling lambat tahun 2015 seluruh laporan keuangan pemerintah daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus mengikuti SAP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dengan tujuan agar lebih *accountable* dan kualitas laporan keuangan tersebut semakin berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Azlim et al, 2012).

Laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun komponen yang disampaikan meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Laporan keuangan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan. Setelah BPK memberikan opini, laporan keuangan disampaikan kepada pemerintah, DPR/DPRD, investor, kreditor, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara (Tanjung, 2008). Dalam hal ini BPK dapat memberikan 4 macam opini, yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak memberikan Pendapat (*Disclaimer*). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah ini menunjukkan laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan laporan keuangan yang disajikan sudah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat pada PP No. 71 Tahun 2010.

Namun faktanya menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2011 atas LKPD Tahun 2010 dari 358 LKPD, BPK memberikan opini WTP atas 32 LKPD, opini WDP atas 271 LKPD, opini tidak wajar atas 12 LKPD dan opini TMP atas 43 LKPD. Sedangkan terhadap 5 LKPD Tahun 2009 BPK memberikan opini TMP (<http://www.bpk.go.id>). Hasil evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian intern telah memadai. Sedangkan, LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan. Masih banyaknya opini TW dan TMP yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah belum optimal. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam LKPD sebagai dasar pengambilan keputusan (Sukmaningrum, 2012).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo.

TINJAUAN TEORETIS

Akuntansi Pemerintahan

Menurut Mursyidi (2009: 1), akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*) banyak menyatakan teminologi lama dan bergeser ke istilah akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Nordiawan *et.al* (2007: 4), menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Selain itu, bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan UU yang berlaku. Dengan beragam karakteristik organisasi pemerintahan yang telah disajikan, akuntansi pemerintahan berkembang dengan ciri-ciri sebagai berikut:

Investasi pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan, Pada umumnya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan investasi yang besar pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik lainnya.

Tidak ada pengungkapan laba, Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan pencapaian laba. Dalam sektor pemerintahan, tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak oleh masyarakat dengan jasa yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak akan terdapat laporan laba rugi yang mengungkapkan pencapaian sebuah laba.

Tidak ada pengungkapan kepemilikan, Pemerintah tidak mempunyai kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan, dan pemerintah tidak dimiliki oleh individu atau golongan. Dengan demikian, tidak akan terdapat pernyataan atau pengungkapan yang menunjukkan kepemilikan suatu pihak seperti halnya ditunjukkan oleh bagian modal sebuah neraca perusahaan.

Penggunaan akuntansi dana, Dengan segala karakteristik yang melekat pada organisasinya, akuntansi lebih memandang pemerintah sebagai kesatuan dana dengan tujuan dan misi tertentu, tidak sebagai sebuah entitas organisasi yang mempunyai kepemilikan. Hal ini memberikan implikasi pada penggunaan persamaan akuntansi yang tidak lagi menggunakan modal pemilik melainkan saldo laba.

Sedangkan tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan ada tiga macam, yaitu:

Pertanggungjawaban, Tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab, terkait kegiatan unit-unit pemerintahan.

Manajerial, Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.

Pengawasan, Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Mahmudi (2011: 271), Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berikut adalah manfaat standar akuntansi pemerintahan: (1) standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan; (2) standar akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya; (3) standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan; (4) standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan; dan (5) standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.

Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010). Dengan ditetapkannya SAP, diharapkan dapat terciptanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan sendiri perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan (Mahmudi, 2011: 271).

Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkungan pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Dengan demikian, penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Nordian et al, 2009: 123). Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur tiga hal, yaitu: (1) pengakuan; (2) pengukuran; dan (3) pengungkapan.

Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Robert dan Vijay (2005: 174) dalam Nurlaila (2014: 31) menyatakan bahwa efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Suatu sistem dikatakan efektif jika output yang dihasilkan oleh suatu orang (kelompok) sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dari penjelasan diatas dapat didimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dikatakan efektif jika tujuan yang dicapai oleh instansi pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan tersebut adalah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah.

Laporan Keuangan

Menurut Permadi (2013: 49) menyatakan laporan keuangan adalah suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010). Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Adapun definisi lain dari laporan keuangan adalah bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007: 7).

Mardiasmo (2002: 160) menyatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial.

Tujuan Laporan Keuangan

Mahmudi (2011:276) menyatakan tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: (1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah; (2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah; (3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; (4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; (5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; (6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan (7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Sedangkan pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran, dan indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Pengguna dan Kebutuhan Informasi

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: (1) masyarakat; (2) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; (3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan (4) pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Sehingga laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

Komponen Laporan Keuangan

Menurut PP No. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa terdapat tujuh laporan keuangan pokok, yaitu:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyajikan ikhtisar sumber, lokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode

pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca, merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk suatu entitas pada saat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional (LO), menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

Relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan adalah: (1) memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*); (2) memiliki manfaat prediktif (*predictive value*); (3) tepat waktu; dan (4) lengkap.

Andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut: (1) penyajian jujur; (2) dapat diverifikasi (*verifiability*); dan (3) netralitas.

Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan

secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan (PP No. 71 tahun 2010). Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu: (1) materialitas; (2) pertimbangan biaya dan manfaat; dan (3) keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah “Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah”.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011: 8).

Populasi dalam penelitian ini adalah 35 karyawan bagian akuntansi atau keuangan di 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari dinas dan badan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sample, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah karyawan atau staff yang berada di bagian keuangan atau akuntansi yang berjumlah 35 orang, hal ini dikarenakan judul penelitian ini mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan yang tentunya digunakan oleh bagian keuangan atau akuntansi di SKPD Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui pihak perantara. Adapun teknik yang digunakan adalah kuisisioner (angket). Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Kuisisioner dapat berupa pertanyaan/pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet (Sugiyono, 2012: 192). Pengisian kuisisioner dilakukan secara langsung oleh responden dengan memberi tanda pada jawaban yang telah disediakan. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup dan terstruktur, yang artinya jawaban pada setiap pertanyaan yang

disediakan responden tidak diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban selain jawaban-jawaban yang disediakan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Variabel atau indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan (Afifah, 2009: 27). Ketiga indikator tersebut masing-masing dijadikan pedoman kedalam item-item pertanyaan pada kuisioner.

Variabel Dependen

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK)

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Variabel atau indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010). Keempat indikator tersebut masing-masing dijadikan pedoman kedalam item-item pertanyaan pada kuisioner.

Pengukuran indikator-indikator variabel menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Ukuran yang digunakan untuk menilai jawab-jawaban yang diberikan dalam menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu lima tingkatan, bergerak dari satu sampai lima.

Teknik Analisis Data

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur apa yang ingin diukur atau alat ukur yang digunakan mengenai sasaran. Validitas pernyataan-pernyataan yang telah disiapkan dapat diukur dengan mengkorelasikan skor setiap pertanyaan dengan jumlah skor totalnya. Dalam hal ini, pernyataan yang mempunyai nilai koefisien korelasi terhadap skor total lebih kecil dari nilai kritisnya berarti tidak lolos uji validitas dan harus diperbaiki atau dibuang. Untuk menguji validitas antara masing-masing skor total dengan menggunakan rumus teknik korelasi *Product Momen*. Syarat minimum untuk memenuhi validitas adalah apabila $r = 0,3$. Jika korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2011: 183).

Uji Reliabilitas

Sugiyono (2011: 268) menyatakan reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama atau peneliti yang sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Untuk uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,6 (Ghozali dalam Irwana, 2010:64).

Uji Regresi Linear Sederhana

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear sederhana. Dalam persamaan regresinya dapat ditunjukkan sebagai berikut (Ghozali, 2006):

$$KLK = a + b_1SAP + e$$

Dimana:

KLK = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b_1 = Koefisien Regresi/Slop

SAP = Standar Akuntansi Pemerintahan

a = Konstanta

e = Nilai Standar error

Uji Hipotesis

Untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) merumuskan hipotesis statistik; (2) menentukan *level of significance* (α) sebesar 5%; (3) menghitung besarnya t_{hitung} dengan menggunakan SPSS 20 for windows; (4) menetapkan kriteria pengujian hipotesis; dan (5) menarik kesimpulan berdasarkan uji statistik yang dilakukan.

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (pengaruh *coreproduct* dan *augmented product*) sangat terbatas.

Menurut Ghozali (2006: 83), nilai koefisien determinasi mendekati 1, berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini data yang diperlukan didapat dengan cara memberikan kuisisioner kepada 4 SKPD Kabupaten Sidoarjo. Jumlah kuisisioner yang diberikan adalah sebanyak 35 kuisisioner kepada 4 SKPD, yang kembali dan dapat dianalisis sebanyak 33 kuisisioner (94,2%). Lebih jelasnya mengenai data penyebaran kuisisioner dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1
Data Penyebaran Kuisisioner

Keterangan	Jumlah	Prosentase (%)
Jumlah kuisisioner yang disebar	35	100%
Jumlah kuisisioner yang dikembalikan (terkumpul)	33	94%
Pengisian tidak lengkap	0	0%
Jumlah kuisisioner yang diolah	33	94%

Sumber: Hasil Pengisian Kuisisioner

Sedangkan responden yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada bagian akuntansi atau keuangan pada 4 SKPD Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 35 orang.

Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur yang digunakan dapat mengukur apa yang ingin diukur. Butir pertanyaan dikatakan valid apabila korelasi (r) > r . Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ (0,344), maka butir pertanyaan atau variabel tersebut valid. Adapun hasil dari pengujian validitas yang nampak pada tabel 2 dan 3:

Tabel 2
Hasil Pengujian Validitas Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Item	R _{hitung}	R _{tabel}	Hasil
1	0,596	0,344	Valid
2	0,625	0,344	Valid
3	0,595	0,344	Valid
4	0,557	0,344	Valid
5	0,710	0,344	Valid
6	0,573	0,344	Valid
7	0,521	0,344	Valid

Sumber: Output SPSS

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai r_{hitung} pada semua item pertanyaan variabel Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menunjukkan angka yang lebih besar dari r_{tabel} (0,344), sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item pertanyaan Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut valid dan dapat dipergunakan dalam penelitian.

Tabel 3
Hasil Pengujian Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Item	R _{hitung}	R _{tabel}	Hasil
1	0,601	0,344	Valid
2	0,691	0,344	Valid
3	0,484	0,344	Valid
4	0,595	0,344	Valid
5	0,441	0,344	Valid
6	0,629	0,344	Valid
7	0,462	0,344	Valid
8	0,534	0,344	Valid
9	0,621	0,344	Valid
10	0,681	0,344	Valid
11	0,721	0,344	Valid

Sumber: Output SPSS

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai r_{hitung} pada semua item pertanyaan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan angka yang lebih besar dari r_{tabel} (0,344), sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item pertanyaan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut valid dan dapat dipergunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya dalam mendapatkan data penelitian, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Uji reliabilitas menggunakan *cronbach's alpha* yang diaplikasikan dengan program SPSS versi 20. Apabila nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6 maka alat ukur dinyatakan reliabel. Adapun hasil uji reliabilitas yang nampak pada tabel 4 dan 5:

Tabel 4
Hasil pengujian Reliabilitas Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	0.696	0,6	Reliabel

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang nampak pada tabel 4, untuk variabel Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih

besar dari 0,6 yaitu 0,696. Dengan demikian semua item pertanyaan dari variabel Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan reliabel.

Tabel 5
Hasil pengujian Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,801	0,6	Reliabel

Sumber: Lampiran Output SPSS

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang nampak pada tabel 5, untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6 yaitu 0,801. Dengan demikian semua item pertanyaan dari variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah reliabel.

Hasil Pengujian Regresi Linear Sederhana

Uji regresi linear sederhana bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil model analisis regresi linear sederhana dapat ditunjukkan dalam tabel 6:

Tabel 6
Hasil Pengujian Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	28.971	7.813		3.708	.001
	SAP	.622	.263	.391	2.367	.024

a. Dependent Variable: KLIK

Sumber: Output SPSS

Dari data hasil analisis regresi linear sederhana pada tabel 6, diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$KLIK = 28,971 + 0,622 \text{ SAP}$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan bahwa: (1) konstanta (a) sebesar 28,971, menyatakan bahwa Apabila nilai variabel Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLIK) adalah sebesar 28,971. (2) koefisien regresi (b_1) untuk SAP sebesar 0,622, menunjukkan bahwa besarnya nilai koefisien regresi untuk variabel Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu 0,622 dan mempunyai koefisien regresi positif. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan yang searah dengan variabel terikat.

Jadi, setiap ada kenaikan pada nilai variabel Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebesar 1 satuan dapat menaikkan nilai variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLIK) sebesar 0,622 dan sebaliknya apabila terjadi penurunan pada nilai variabel Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebesar 1 satuan dapat menurunkan nilai variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLIK) sebesar 0,622 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian pengaruh variabel bebas (efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah) terhadap variabel terikat (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah) dapat dilakukan dengan uji t, adapun hasil dari pengujian dengan menggunakan uji t dapat ditunjukkan pada tabel 7:

Tabel 7
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		t	Sig.	Correlations		
				Zero-order	Partial	Part
1	Constant)	3.708	.001			
	SAP	2.367	.024	.391	.391	.391

b. Dependent Variable: KLK

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 7 diatas dan melakukan uji dengan tingkat kepercayaan atau signifikansi 95% dengan $\alpha = 0,05$ atau 5%. Maka hasil uji t terhadap variabel bebas yang dapat dijelaskan adalah Nilai t_{hitung} Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebesar 2,367 berada pada tingkat probabilitas signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,024. Jadi berdasarkan tingkat probabilitas signifikansinya, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK).

Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar prosentase pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun hasil dari analisis koefisien determinasi yang terlihat pada tabel 8:

Tabel 8
Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.391 ^a	.153	.126	3.10126

a. Predictors: (Constant), SAP

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan bahwa nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,153 atau 15,3%. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 15,3% dan sisanya 84,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Hasil Uji Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan terkait pengaruh efektivitas penerapan standar pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 2,367 dengan nilai signifikansi sebesar $0,024 < 0,05$ dan hasil uji regresi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,622 menunjukkan bahwa variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 15,3% dan sisanya sebesar 84,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika penerapan standar akuntansi pemerintahan semakin baik maka semakin berkualitas juga laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan yang diharapkan memerlukan peraturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan/pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah dalam hal ini adalah Standar Akuntansi Pemerintahan.

PP 71 Tahun 2010 menyebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya dalam PP tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel maka perlu diterapkannya SAP. Penerapan SAP yang sesuai dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu atas kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hal ini terbukti dari opini yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2009 Kabupaten Sidoarjo mendapat opini Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer*) dari BPK, tahun 2010 hingga tahun 2012 opini yang diberikan BPK naik menjadi Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*) dan pada tahun 2013 Kabupaten Sidoarjo berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*). Pemberian opini tersebut adalah bukti bahwa pemahaman dan penerapan SAP oleh entitas akuntansi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo sudah ada peningkatan dan lebih baik. Hal ini secara umum menggambarkan tentang peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan oleh seluruh SKPD di Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila (2014) dengan judul Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Enrekang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2008) dalam Azlim et al (2012) yang menyatakan bahwa terdapat perubahan/perbedaan atas hasil laporan keuangan yang lebih berkualitas setelah menerapkan SAP dengan sebelum menerapkan SAP.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik simpulan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidoarjo sudah sangat efektif, sedangkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo pun sudah sangat berkualitas. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan program SPSS versi 20. Subjek penelitian ini adalah 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2014. Dari total kuisioner yang disebar yakni sebanyak 35 kuisioner, hanya 33 kuisioner yang kembali dan dapat diolah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui nilai signifikansi sebesar $0,024 < 0,05$ dan hasil uji regresi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,622. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan

analisis koefisien determinasi diketahui bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 15,3% sedangkan sisanya 84,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan simpulan yang ada, adapun saran yang dapat disampaikan antara lain: (1) untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sebaiknya SKPD di Kabupaten Sidoarjo lebih memperhatikan penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sehingga paham terhadap standar dan aturan yang sudah ditetapkan; (2) selain itu untuk SKPD Kabupaten Sidoarjo disarankan untuk karyawan atau staf yang telah mengikuti sosialisasi mengenai standar akuntansi pemerintahan dan sudah memiliki kemampuan atau kompetensi dibidangnya diharapkan tidak dipindahkan ke bagian yang lain dan menggantikannya dengan karyawan yang baru, sehingga kualitas dari laporan keuangan tersebut akan terjaga dan bisa lebih ditingkatkan lagi; (3) untuk peneliti selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian, tidak hanya terbatas pada standar akuntansi pemerintahan namun juga dapat menambah variabel independen lain yang mungkin memiliki pengaruh juga terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; dan (4) selain itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas subjek penelitian, tidak terfokus pada beberapa dinas seperti halnya pada penelitian ini yang hanya terfokus pada 4 SKPD di Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N.N. 2009. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Azlim, Darwanis, dan U.A. Bakar. 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi* vol 1: 1-14.
- BPK RI. 2011. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. <http://www.bpk.go.id/news/hasil-pemeriksaan-bpk-semester-i-tahun-2011>. 04 Oktober 2014 (09:35).
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan penerbit UNDIP. Semarang.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Irwana, T. 2010. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Penelitian Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Jawa Barat. *Skripsi*. Program Studi Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Pres. Yogyakarta.
- Mardiasmo 2002. *Akuntansi Sektor Publik Indonesia*. Andi. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Nordiawan, D., I.S. Putra, dan M. Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nurlaila. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.

- Permadi, A.D. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung.
- Rachmat. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Sangadji, E.M. dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Sekaran, U. 2006. *Research Methods For Business*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R& D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Sukmaningrum, T. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Tanjung, A.H. 2008. *Akuntansi Pemerintahan Daerah, Konsep dan aplikasi*. Cetakan Kedua. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.